

**Matriks Target Capaian
Usulan Rencana Aksi Nasional
Open Government Indonesia 2023-2024**

Judul Komitmen

Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS
(Usul judul dari OGI: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS)

**Kementerian/Lembaga
Penanggung Jawab**

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kementerian/Lembaga Terkait

1. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
2. Direktorat Hukum dan Regulasi

Bappenas

1. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

CSO Mitra

Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian				Data Dukung
		B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	Tersedianya peraturan teknis terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	Terlaksananya penyusunan draf peraturan teknis terkait UPTD PPA yang melibatkan masyarakat sipil	Tersedianya peraturan teknis terkait UPTD PPA yang telah disusun dengan kolaborasi bersama masyarakat sipil			
	Terlaksananya sosialisasi terkait implementasi UU TPKS	-	Terlaksananya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik terkait implementasi UU TPKS	Terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi	-	

Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian				Data Dukung
		B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	
	<p>Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA</p> <p><i>(usul dari OGI: bisa digabung ke UK 1, jika memang penyusunan dan sosialisasi standar untuk tata kelola UPTD PPA menjadi follow up peraturan turunan)</i></p>	-	-	Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA sesuai peraturan teknis dan masukan masyarakat luas	Terlaksananya sosialisasi sistem dan mekanisme kepada pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil level regional dan lokal	Adanya desain awal untuk standar penerapan UPTD PPA di daerah dan lokal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Tersedianya peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	<p>1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP DBK</p> <p>2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP Dana Bantuan Korban</p>	<p>1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam pembahasan RPP DBK pada tahap Harmonisasi.</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi K/L dalam proses pemberian persetujuan RPP DBK</p>	<p>1. Terlaksananya sosialisasi PP Dana Bantuan Korban</p> <p>2. Tersusunnya Draf Peraturan Teknis terkait Dana Bantuan Korban sebagai turunan dari RPP DBK</p>	<p>1. Terlaksananya sosialisasi PP Dana Bantuan Korban</p> <p>2. Tersedianya Peraturan Teknis terkait Dana Bantuan Korban sebagai turunan dari RPP DBK</p>	
Kementerian Hukum dan	Tersedianya peraturan teknis terkait Dana	1. Tercantumnya usulan draf dalam	Terselenggaranya sosialisasi draf	Tersusunnya draf hasil PAK dan	Penyampaian draf kepada Presiden	

Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian				Data Dukung
		B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	
Hak Asasi Manusia	Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	kerangka regulasi perencanaan 2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	dalam rangka pelibatan publik secara luas	selesaiannya proses harmonisasi terhadap draf	untuk ditetapkan dan pengundangan dalam lembaran Negara	
INFID	Tersedianya kajian dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS	Tersedianya kajian mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait UPTD PPA untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis mengenai UPTD PPA	-	-	
	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan sosialisasi implementasi UU TPKS	-	-	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi hasil sosialisasi	
	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan	-	Tersedianya kajian terkait UPTD PPA, termasuk untuk masukan proses	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberian masukan	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi proses perbaikan tata kelola UPTD	

Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian				Data Dukung
		B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	
	penerima manfaat UPTD PPA		perbaikan tata kelola UPTD PPA	terhadap proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	PPA	
IJRS	Tersedianya kajian dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	<p>Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait DBK</p> <p>Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP Dana Bantuan Korban</p>	<p>Tersedianya kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait DBK</p> <p>Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas</p>	Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi PP terkait DBK	Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi PP terkait DBK	